



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
2. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Tujuan disusunnya SOP perlindungan anak yang hidup di jalan untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan perlindungan anak yang hidup di jalan.

- (2) Maksud disusunnya SOP perlindungan anak yang hidup di jalan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka perlindungan anak yang hidup di jalan secara terpadu.

Pasal 3

Tahapan kegiatan perlindungan anak yang hidup di jalan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD






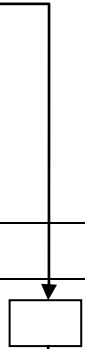



ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												
Mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan yang melalaikan kewajiban sehingga anak tak hidup di jalan melalui konferensi kasus (<i>case conference</i>)									- Form Surat permohonan pencabutan kuasa asuh orangtua atau wali	2 hari	Surat pencabutan kuasa asuh orangtua atau wali ke pengadilan	
Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar												
Mengusahakan pemenuhan sandang, pangan dan tempat tinggal									- Operasional lembaga terkait penyediaan sara pemenuhan kebutuhan dasar anak	6 bulan	Anak terpenuhi kebutuhan dasarnya / nutrisi	
Pemenuhan hak kesehatan												
Memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas dan jejaringnya									- Kartu Berobat Puskesmas - Kartu Jamkessos Kelompok - Daftar dari Panti/LKSA	3hari kerja	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	
												

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan	
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/ Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan melalui rumah sakit umum tingkat rujukan melalui rumah sakit milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas									- Kartu Berobat RS - Kartu Jamkessos Kelompok - Surat rujukan puskesmas - Daftar dari Panti/LKSA	3hari kerja	Pelayanan kesehatan di RS		
Pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat tanpa melalui mekanisme rujukan									- Kartu Berobat RS - Kartu Jamkessos Kelompok - Daftar dari Panti/LKSA	3 hari kerja	Pelayanan pengobatan darurat		
Memberikan rekomendasi apabila dibutuhkan pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat bagi anak yang tidak memiliki pengampu dengan syarat ada surat keterangan									- Surat keterangan	2 x 24 jam	Rekomendasi Dinas Sosial setempat		
Mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan									- Surat keterangan	3 hari	Daftar anak terjamin jamkes		
Menanggung biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan melalui mekanisme jaminan kesehatan									Daftar anak terjamin jamkes	3 hari	Biaya pengobatan melalui jamkes		

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
	Dinas Sosial	LKSA	Tim Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas DIKPORA DIY	Puskesmas	Rumah Sakit	Jamkes Masyarakat/ Sosial/Daerah	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												
Melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal									- Sarana mobilitas	1 minggu	Anak diserahkan kembali ke orangtua atau keluarga asal	
Mencatat pegembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal di dalam Berita Acara Pengembalian									- Berita acara	2 hari	Berita acara penyerahan anak	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001